

Penyusunan Laporan Keuangan Desa dari Basis Kas Menuju Basis Akrual (Studi Kasus di Desa Muzoi Kecamatan Lahewa Timur)

¹Serniati Zebua, ²Kurniawan Sarototonafo Zai, ³Dedi Irawan Zebua, ⁴Tri Hartati Sukartini Hulu, ⁵Sophia Molinda Kakisina, ⁶Noviza Asni Waruwu, ⁷Nanny Artatina Bu'ulolo, ⁸Perlindungan Faebudodo Hulu

^{1,2,3,4,5,6}Program Studi Akuntansi, Universitas Nias, Gunungsitoli, Indonesia

⁷Program Studi Manajemen, Universitas Nias, Gunungsitoli, Indonesia

⁸Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Nias, Gunungsitoli, Indonesia

Email Corresponding: ¹sernizebua97@gmail.com, ²kurniawans.zai@unias.ac.id, ³dedizebua8@gmail.com,

⁴tryhulu21@gmail.com, ⁵molindasophia@gmail.com, ⁶noivnoiv11@gmail.com, ⁷nannyartatinabll@gmail.com,

⁸perlinhll@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL		ABSTRAK
Kata Kunci: Laporan Keuangan Desa Basis Kas Basis Akrual		Tujuan pelaksanaan PKM ini adalah untuk membantu para aparat Desa dalam menyusun Laporan Keuangan Desa dari Basis Kas menuju Basis Akrual sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP 01). Fenomena masalah dalam pelaksanaan PKM ini adalah adanya ketidaksesuaian dan kesalahpahaman dalam penyusunan laporan keuangan desa karena tidak adanya aparat desa yang berlatar belakang Pendidikan akuntansi dan tidak memahami menggunakan aplikasi SISKEUDES. Jenis penelitian yang digunakan dalam PKM ini adalah menggunakan deskriptif kualitatif menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara kepada Informan. Hasil PKM yang diperoleh yaitu Laporan Keuangan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa saat ini masih menggunakan basis kas dalam menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Sesuai dengan perkembangan zaman, Laporan Keuangan Desa diarahkan menggunakan basis akrual dalam menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan atas aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Salah satu tujuan Laporan keuangan Desa disusun yaitu dalam rangka menyajikan informasi realisasi anggaran dan posisi keuangan pemerintah desa yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi kebijakan/keputusan lalu dan merencanakan kebijakan di masa yang akan datang. Selain itu, laporan keuangan pemerintah desa sebagai bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) pemerintah desa atas sumber daya yang dikelola dan/atau dipercayakan kepada Pemerintah Desa.
		ABSTRACT
Keywords: Village Financial Report Cash Basis Accrual Basis		The purpose of implementing this PKM is to assist village officials in preparing Village Financial Reports from Cash Basis to Accrual Basis in accordance with Government Accounting Standards (PSAP 01). The problem phenomenon in implementing this PKM is the existence of inconsistencies and misunderstandings in preparing village financial reports because there are no village officials with an accounting education background and do not understand how to use the SISKEUDES application. The type of research used in this PKM is using qualitative descriptive using primary data obtained from interviews with Informants. The results of the PKM obtained are that the Village Financial Report prepared by the Village Government currently still uses a cash basis in organizing accounting and presenting financial reports on income, expenditures, and financing in the Budget Realization Report. In accordance with the development of the times, the Village Financial Report is directed to use an accrual basis in organizing accounting and presenting financial reports on assets, liabilities, and equity in the Balance Sheet. One of the objectives of compiling the Village Financial Report is to present information on budget realization and the financial position of the village government which is useful for report users in evaluating past policies/decisions and planning future policies. In addition, the village government financial report is a form of accountability of the village government for the resources managed and/or entrusted to the Village Government.
		This is an open access article under the CC-BY-SA license.
		

I. PENDAHULUAN

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan Desa meliputi:

1. Perencanaan;
2. Pelaksanaan;
3. Penatausahaan;
4. Pelaporan; dan
5. Pertanggungjawaban
6. Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.

Pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan Basis Kas. Basis Kas merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Basis Akuntansi

Beberapa jenis basis pencatatan (International Practice) yang terdiri dari:

1. Basis kas (cash basis) yaitu pengakuan / pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas.
2. Basis akrual (accrual basis) yaitu dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi (dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar). Oleh karenanya transaksi-transaksi dan peristiwa- peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya.
3. Basis kas modifikasi (modified cash basis) yaitu mencatat transaksi dengan basis kas selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan basis akrual.
4. Basis kas menuju akrual (cash toward accrual) yaitu basis akuntansi yang dikembangkan di Indonesia sebagai transisi menuju basis akrual penuh, dengan cara menggunakan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam LRA dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca
5. Basis akrual modifikasi (modified accrual basis) yaitu mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk sebagian besar transaksi. Pembatasan penggunaan dasar akrual dilandasi oleh pertimbangan kepraktisan.

II. MASALAH

Fenomena masalah dalam pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat ini adalah banyak aparat Desa terutama bagian Kaur Keuangan yang masih belum memahami bagaimana cara membedakan penyusunan laporan keuangan desa menggunakan basis kas dan basis akrual menggunakan aplikasi SISKEUDS. Hal ini tentunya sangat disayangkan karena tidak adanya aparat desa yang memiliki latar belakang akuntansi dan memahami bagaimana cara Menyusun laporan keuangan desa yang baik dan benar berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Gambar 1. Foto Bersama

III. METODE

Menurut Sugiyono (2017:9) penelitian adalah cara ilmiah untuk mencari solusi dari masalah-masalah yang dihadapi dengan cara yang sistematis. Kata Penelitian adalah terjemahan dari kata research yang berasal dari bahasa Inggris. Aktivitas penelitian melibatkan langkah-langkah tertentu yang dirancang untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data guna mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk mendukung atau menguji hipotesis, menjawab pertanyaan penelitian, atau memecahkan suatu masalah.

Metode penelitian kualitatif Menurut Helaluddin (2019:30) adalah suatu pendekatan penelitian yang fokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial atau perilaku manusia. Metode ini bertujuan untuk menggali makna, interpretasi, dan konteks dari suatu situasi atau kejadian, serta mengeksplorasi kompleksitas hubungan antara variabel-variabel yang terlibat.

Menurut Sugiyono (2020:16), metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk memeriksa populasi atau sampel tertentu dan mengumpulkan data menggunakan alat penelitian, menganalisis data kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan.

Berdasarkan menurut para ahli di atas maka penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Muzoi Kec. Lahewa Timur, Kab. Nias Utara, Sumatera Utara.

Menurut Sugiyono (2020:193) data primer adalah suatu informasi yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama atau dari sumber yang bersumber langsung dari kejadian atau objek yang sedang diteliti. Data ini dikumpulkan khusus untuk tujuan penelitian tertentu dan belum pernah digunakan atau diproses sebelumnya.

Dalam hal ini peneliti mendapatkan data secara langsung baik secara individu maupun kelompok, lisan maupun tulis. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah berupa kata, frasa, kalimat, ekspresi, suasana, dan percakapan. Yang menjadi data primer pada penelitian ini yaitu hasil wawancara yang di peroleh dari informan, hasil pengamatan peneliti di lokasi penelitian, dan dokumentasi yang diambil pada saat melakukan wawancara, sehingga data informasi tersebut menjadi bahan peneliti untuk dianalisa.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Laporan Keuangan Desa Dari Basis Kas Menuju Basis Akrua

Laporan Keuangan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa saat ini masih menggunakan basis kas dalam menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Sesuai dengan perkembangan zaman, Laporan Keuangan Desa diarahkan menggunakan basis akrual dalam menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan atas aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Salah satu tujuan Laporan keuangan Desa disusun yaitu dalam rangka menyajikan informasi realisasi anggaran dan posisi keuangan pemerintah desa yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi kebijakan/keputusan lalu dan merencanakan kebijakan di masa yang akan datang.

Selain itu, laporan keuangan pemerintah desa sebagai bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) pemerintah desa atas sumber daya yang dikelola dan/atau dipercayakan kepada Pemerintah Desa.

Adapun perbedaan penyusunan laporan keuangan Desa dari basis kas yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sementara basis akrual yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Untuk keperluan tersebut, saat ini tengah dalam proses penyusunan Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) sebagai komite independen yang ditunjuk Undang-Undang sebagai penyusun standar.

Dengan demikian, tidak ada salahnya Pemerintah Desa mulai dari sekarang mengenal terlebih lebih dulu konsep publikasian Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa sebagai persiapan agar lebih paham sebelum diimplementasikan secara nasional nantinya.

KPPN telah mendedikasikan diri untuk bisa menjadikan Desa sebagai desa role model dalam tata kelola keuangan desa telah melakukan pendampingan secara langsung (luring) maupun daring (online) yang juga bisa diikuti oleh Desa lainnya, dalam tema Bedah Laporan Keuangan Desa.

Melalui kegiatan tersebut, disampaikan bagaimana penyusunan Laporan Keuangan Desa berbasis akrual, hal yang sama telah diterapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah selama ini dan mendapatkan opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Adanya Neraca dalam penyusunan basis akrual dalam Laporan Keuangan Desa, tentunya menjadi hal baru bagi Pemerintah Desa. Neraca Desa memberikan informasi mengenai Aset (kekayaan) dan Kewajiban entitas pemerintah Desa pada tanggal dan perubahan kekayaan selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap entitas Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan Desa di masa mendatang.

Pemerintah Desa ABC
Kecamatan KLM, Kabupaten XYZ
Rincian Aset Tetap Desa per 31 Desember 20xx

Contoh

No.	Klas Aset dan Nama/Identitas Aset Tetap	Bukti Kepemilikan Jenis Nomor Tanggal	Kode Aset Tetap	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Kondisi Aset Tetap ^{a)}	Keterangan
I	Tanah						
	1 Tanah Persil A, Luas 2200 m ²	HGB 230/2014 2 Juli 2014		2014	50,000,000	Baik	
	2 Tanah Lapangan X, Luas 1000 m ²			1998		Rusak Ringan	Nilai perolehan belum diketahui
	3						
II	Peralatan, Mesin, dan Alat Berat						
	1 Komputer, PC			2014	5,000,000	Baik	
	2						
	3						
III	Kendaraan						
	1 Motor, merk QQQ, 100cc, No Polisi: DS/BPKB	1231212 4 Des 2014		2014	10,000,000	Baik	
	2						
	3						
IV	Gedung dan Bangunan						
	1 Bangunan Kantor, Luas 200 m ²	IMB 432 2 Juli 2014		2014	75,000,000	Baik	
	2						
	3						
V	Jalan						
	1 Jalan Desa Lokasi di, 800m			2014	50,000,000	Baik	
	2						
	3						
VI	Jembatan						
	1 Jembatan XYZ Lokasi di, 50m			2014	40,000,000	Baik	
	2						
	3						
VII	Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase						
	1 Embung XYZ, Lokasi di			2014	40,000,000	Baik	
	2						
	3						
VIII	Jaringan/Instalasi						
	1 Jaringan Listrik Desa, Lokasi di			2014	120,000,000	Baik	
	2						
	3						
IX	Aset Tetap lainnya						
	1 Sapi 3 ekor			2014	30,000,000		
	2						
	3						
X	Konstruksi dalam Pengerjaan						
	1 Pembangunan Jembatan dalam Konstruksi			Konstruksi 201	65,000,000		
	2						
	3						
Total Nilai Aset Tetap per 31 Desember 20xx					485,000,000		

^{a)} Diisi dengan Baik (B), Rusak Ringan (RR), dan Rusak Berat (RB)

Gambar 2. Neraca Penyusunan

Hal penting sebelum penerapan penyusunan Laporan Keuangan Desa basis akrual, pemerintah Desa mulai dari sekarang juga perlu melakukan pendataan Aset Desa untuk penilaian awal Aset, melalui inventarisasi fisik, catatan, laporan, atau dokumen sumber lainnya.

Melalui pencatatan Aset Desa yang tertib akan memudahkan dalam penyusunan penilaian awal Aset, baik berdasarkan nilai perolehan maupun nilai taksiran. Desa juga harus memulai membuat Daftar Barang Inventaris setiap Ruangannya maupun Daftar Inventaris Lainnya, termasuk pencatatan keluar masuk barang persediaan.

Di sisi lain, apabila Pemerintah Desa memiliki Kewajiban Desa juga akan ditampilkan dalam Neraca, yang diakui pada saat dana pinjaman diterima atau saat kewajiban timbul dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

Selain itu, Pemerintah Desa juga harus mengungkapkan semua informasi penting, baik yang telah tersaji dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca maupun yang tidak tersaji, pada Catatan atas Laporan Keuangan Desa (CaLK Desa).

Saat ini, Pemerintah Desa telah menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebagai alat bantu dalam penatausahaan keuangan Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dengan demikian, bila penerapan Laporan Keuangan Desa basis akrual tinggal dilakukan penyesuaian seperlunya.

Menjadi pekerjaan bagi Pemerintah Desa sebelum penerapan penyusunan Laporan Keuangan Desa basis akrual dengan mengadakan pembelajaran akuntansi, bimbingan teknis dan workshop basis akrual bagi Pengelola Keuangan Desa.

Singkat kata, melalui perubahan Laporan Keuangan Desa dari basis kas menuju basis akrual nantinya akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta bermanfaat bagi para pengguna laporan atas penyajian data yang akurat, lengkap dan andal dalam Laporan Keuangan Desa.

V. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Lahewa Timur masih memiliki kendala.
2. Basis Kas di dalam Pengelolaan Keuangan Desa sebagai bentuk format sederhana masih belum dilaksanakan sepenuhnya.
3. Ide penerapan Basis Kas menuju Akrual atau Akrual murni masih menjadi wacana dan dimungkinkan diterapkan setelah pengelolaan keuangan desa sesuai dengan permendagri 20/2018 terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ferarow, N., & Suprihanto, J. (2018). Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Sumberadi dan Tlogoadi di Kabupaten Sleman: Evaluasi Praktik Transparansi dan Akuntabilitas. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(2), 64–69. <https://doi.org/10.18196/jati.010207>
- Fitra, Amanda . 2016. “Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Penggunaan Dan Pelaporan Dana Desa (Kasus: Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul).” Universitas Gadjah Mada.
- Kartika, Ayu, Putu Nomy Yasintha, Kadek Wiwin, and Dwi Wismayanti. 2018. “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2016 (Studi Kasus : Desa Pemecutan Kaja , Kecamatan Denpasar Utara).” *Jurnal Citizen* 1(1).
- Kholmi, M. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Des: Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. *Ekonomika- Bisnis*.
- Ngongare, Yanis. 2016. “Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kokoleh Satu Kecamatan Likupang Selatan.” *Jurnal Eksekutif* 1(8).
- Putri, M., Suharno, & Widarno, B. (2018). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Pengawasan Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa. *Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 14, 69–75. <https://doi.org/10.1016/j.dib.2016.02.036>
- Rahayu, Depi. 2017. “Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.” *Economics Development Analysis Journal* 6(2).
- Reflay Ade Sagita, W. (2017). Pengawasan Penggunaan Dana Transfer Untuk Menjamin Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(2), 293–306. <https://doi.org/jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/download/1862/1406>
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 tahun 2009 Tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan
- Wenda, G. (2017). Pengelolaan Dana Desa: Studi kasus di Desa Gondangrejo Kecamatan Wonorejo Kabupaten Karanganyar.
- Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*.
- Widagdo, Ari Kuncara, Agus Widodo, and Muhammad Ismail. 2016. “Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 19(2): 323–40
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.